



Selamat dan Sukses HARI JADI KE-72 KABUPATEN KULON PROGO

15 OKTOBER 1951 - 15 OKTOBER 2023



Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST, MT. Pj. Bupati Kulon Progo

Manunggal Karsa Nawung Kridha Anggayuh Mulya

Tema Peringatan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023, yaitu "Manunggal Karsa, Nawung Kridha, Anggayuh Mulya" memiliki makna yang sangat dalam...

Selain itu, tema tersebut juga mengandung makna kolaborasi semua pihak baik itu pemerintah, swasta atau dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat...

Kabupaten Kulon Progo yang menginjak usia 72 tahun ini, selain sudah banyak kemajuan dan prestasi maupun pengakuan dari berbagai pihak dalam bentuk penghargaan baik di tingkat nasional maupun daerah...

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates...

Kabupaten Kulon Progo terletak diantara 110°1' 37" - 110°16' 26" BT dan antara 7°38' 42" - 7°59' 03" LS dengan batas administrasi...

sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
sebelah barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
sebelah utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
sebelah selatan : Sumatera Indonesia

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan. Kawasan Pesisir, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut...

Kawasan Dataran, merupakan daerah berbukit dengan ketinggian antara 100 - 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggung...

Kawasan Pegunungan, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 - 1000 meter dari permukaan air laut...

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 sebanyak 443.591 jiwa atau meningkat sebesar 0,16% dari tahun 2021...

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo lebih banyak berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki. Komposisi jumlah penduduk meliputi perempuan sebanyak 223.815 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 219.776 jiwa.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 303.510 jiwa, kemudian kelompok usia bukan produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 140.081 jiwa...

Rumusan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 didasarkan pada visi strategis daerah serta memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkeadilan, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 4 (empat) Misi Pembangunan sebagai berikut, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkeadilan, dan berbudaya, menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram, serta mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Prioritas daerah Kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam tema pembangunan tahun 2022 adalah: "Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berkarater Dan Berbudaya Untuk Mengoptimalkan Peluang Proyek Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Untuk Pertumbuhan Kulon Progo".

Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi proyek strategis nasional yang berlangsung di Kulon Progo

maupun wilayah DIY, baik yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam proses pembangunan dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang terdampak Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Kulon Progo.

Terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan atau disebut Catur Krida Pembangunan Kulon Progo Tahun 2022, yaitu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur daerah, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya serta optimalisasi tata kelola pelayanan publik.

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusunan yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 mencapai 75,46 atau meningkat sebesar 0,75 poin atau 1,00 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 74,71. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Kulon Progo tetap berstatus "tinggi" dan diatas angka IPM Nasional yang mencapai 72,91.

Hal tersebut menjadi cerminan tingginya kualitas sumber daya manusia serta adanya daya saing yang kuat sehingga eksistensi kehidupan di masa mendatang menjadi lebih terjamin. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh empat komponen yaitu: Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Umur Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 masih tetap tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai 75,28 tahun atau meningkat 0,01 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 75,27 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 mencapai 14,38 tahun atau meningkat sebesar 0,11 tahun atau 0,77 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 14,27 tahun. Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 9,17 tahun atau meningkat sebesar 0,15 tahun atau 1,66 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 9,02 tahun. Selanjutnya Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 mencapai 10.511 ribu rupiah atau naik sebesar 442 ribu atau naik 4,39 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 10.069 ribu. Naikannya angka Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 4,39 persen sebagai indikasi adanya proses pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19.

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.

Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 16,39 persen atau turun sebesar 1,99 persen poin dibanding tahun 2021 yang mencapai 18,38 persen. Meskipun dilihat dari angka capaian masih relatif tinggi dibandingkan dengan angka capaian DIY maupun Indonesia, namun Kabupaten Kulon Progo lebih banyak mengalami penurunan angka kemiskinan.

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

TPT Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 sebesar 2,80 persen, artinya bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 2-3 orang yang masuk kategori pengangguran. Capaian tersebut menurun sebesar 0,89 poin dibanding tahun 2021 yang mencapai sebesar 3,69 persen.

Pekerja di Kulon Progo pada tahun 2022 paling banyak bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebesar 43,65 persen atau mengalami peningkatan 7,76 poin dibanding tahun 2021 sebesar 35,89. Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan permintaan pasar pada sektor manufaktur menurun yang menyebabkan banyak penduduk yang tidak bekerja.

Namun dengan pulihnya ekonomi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali pada status pekerjaan ini.

Selanjutnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2022 mencapai sebesar 34,79 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,36 poin dari tahun 2021 yang mencapai sebesar 37,15 persen. Untuk status pekerjaan berusaha sendiri pada tahun 2022 mencapai 12,38 persen atau mengalami penurunan 3,46 poin tahun 2021 yang mencapai sebesar 15,84 persen. Sementara pekerja dengan status pekerja bebas pada tahun 2022 mencapai 9,18 persen atau mengalami penurunan 1,94 poin dari tahun 2021 yang mencapai sebesar 11,12 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 6,57 persen atau mengalami perubahan positif sebesar 2,20 poin dari tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Hal ini didasarkan pada berubahnya pandemi Covid-19 menjadi endemi sehingga tidak berdampak besar pada perekonomian.

Dilihat dari sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo, pada tahun 2022 semua sektor sudah mengalami pertumbuhan positif. Serta terdapat lima sektor yang mengalami pertumbuhan

tertinggi yaitu sektor Transportasi dan Perdagangan, sektor Jasa Lainnya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah PDRB perkapita/ Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada Tahun 2022 nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo naik menjadi sebesar 31,69 juta rupiah per tahun dibanding nilai PDRB per kapita tahun 2021 yang mencapai sebesar 28,42 juta rupiah per tahun.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Kabupaten Kulon Progo memiliki tipikal masyarakat dan karakteristik wilayah, dimana penduduknya bekerja dilapangan usaha pertanian. Sementara, struktur wilayah yang hampir semua bagian berupa pedesaan menjadikan sebagian masyarakat di Kulon Progo memiliki besaran pendapatan yang homogen. Meski ada kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun berpendapatan di bawah garis normal namun porsinya tidak besar. Kondisi tersebut menjadikan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo berada pada tingkat ketimpangan sedang. Angka Gini ratio pada tahun 2022 sebesar 0,380 atau mengalami peningkatan 0,013 dibanding tahun 2021 yang sebesar 0,367.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Terdapat 6 (enam) bidang urusan dalam Penerapan SPM dan capaian pada tahun 2022 untuk masing-masing bidang urusan telah dilaporkan melalui Sistem Aplikasi SPM.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar SPM pada bidang urusan pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Pendidikan pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 100% (Tuntas Paripurna).

Upaya peningkatan bidang kesehatan perlu dipandang sebagai suatu investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis Pelayanan Dasar SPM pada bidang urusan Kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Kesehatan pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 88,48% (Tuntas Madya).

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib yang erat kaitannya dengan pemenuhan dasar masyarakat dalam hal infrastruktur.

Jenis Pelayanan Dasar SPM pada bidang urusan Pekerjaan Umum terdiri atas Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik. Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 100% (Tuntas Paripurna).

Jenis Pelayanan Dasar SPM pada bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri atas Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 100% (Tuntas Paripurna).

Ketertarikan dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melungsurkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketertarikan dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlimas ini dibagi menjadi 3 (tiga) SPM, yaitu SPM Trantibum, dengan Jenis Pelayanan Dasar berupa

Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, SPM Kebencanaan, dengan Jenis Pelayanan Dasar berupa Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana; dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta SPM Damkar, dengan Jenis Pelayanan Dasar berupa Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Trantibumlimas pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 95,88% (Tuntas Utama).

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi (multi kompleks) sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan secara menyeluruh (holistik), terpadu dan berkelanjutan. Masalah sosial bersifat relatif, namun di masyarakat sering muncul berbagai kejadian dan kemudian disebut masalah sosial.

Jenis Pelayanan Dasar SPM pada bidang urusan Sosial terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tunas Terlantar di Luar Panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Setelah Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Penerapan SPM bidang urusan Sosial pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM adalah sebesar 100% (Tuntas Paripurna).

Koordinasi intensif lintas sektor masih perlu terus dilaksanakan sebagai sarana untuk mencari strategi dan solusi terhadap permasalahan penerapan SPM ini. Selain itu adanya 4 (empat) tahapan Penerapan SPM berupa: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, juga menjadi bagian penting dalam koordinasi lintas sektor tersebut.

Selanjutnya, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyampaikannya pada tanggal 20 Januari 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dilakukan pemeriksaan (audit), pada tanggal 20 Maret 2023 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja, dapat kami sampaikan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.503.689.361.733,00 dengan realisasi sebesar Rp1.530.235.035.264,32 atau 101,77%.

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 1.669.930.685.519,17 dengan realisasi sebesar Rp 1.532.665.350.605,25 atau 91,78%.

Realisasi pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 166.240.459.786,17 atau 100,0% dari anggaran sebesar Rp 166.241.323.786,17.

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah pada tahun 2022 telah dihasilkan 187 satuan inovasi daerah dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 474/C/2022 tentang Satuan Inovasi Daerah Tahun 2022.

Sebagai upaya penerapan lptek dan Inovasi Daerah untuk mendukung peningkatan SDM dan produk lokal yang berdaya saing, telah diselenggarakan ajang Inovasi bagi masyarakat melalui Anugerah lptek Kreanova Menoreh. Dari 30 inovasi yang masuk pada tahun 2022, telah diperoleh hasil penilaian untuk Kategori Pelajar sebesar 6 pemenang, Kategori Masyarakat (Kelompok) sebanyak 3 pemenang, dan Kategori Masyarakat (Perorangan) sebanyak 3 pemenang.

Kabupaten Kulon Progo selama satu tahun yaitu 2022-2023 banyak menorehkan prestasi dan penghargaan yang sangat membanggakan baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Penghargaan tersebut misalnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya.

Di bidang pelayanan publik, antara lain Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapat penghargaan nilai A atau sangat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu di bidang penyelenggaraan perizinan dan kependudukan. Kementerian tersebut juga memberikan penghargaan Digital Government Awards tahun 2023 atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan layanan berbasis elektronik. Demikian halnya Kementerian Desa dan PDTT bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan terbaik nasional di bidang keterbukaan informasi publik kepada Pemerintah Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih.

Beberapa penghargaan dan prestasi yang lainnya, untuk tingkat nasional adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional diraih oleh SD Negeri Kalimener dan MTs Negeri 2 Kulon Progo, Kabupaten Layak Anak, Pembinaan Akreditasi satuan PAUD & Pendidikan Non Formal (PNF). Predikat keputahan standar publik, Penghargaan Health Financing Award, Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional an. drg. Khakimus Sholikhah Imawati, ASEAN Smoke-free Award (ASA) tingkat nasional di 11 Provinsi/Kab/Kota, Piagam Penghargaan kepada Kabupaten Kulon Progo atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,59 dan Status Kinerja Tinggi Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022.

Sedangkan untuk tingkat provinsi adalah Pemerintah Daerah Terbaik Pertama Penerima Penghargaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Award Tahun 2023, Lomba Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, Lomba Petugas OP Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Kategori Pengamat), Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Juara 1 Olimpiade Guru Nasional (OGN) IPS Kabupaten Kulon Progo, Peringkat 10 Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Kategori SD/MI Sederajat, Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (Peringkat 2), Lomba Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Tahun 2023, Piagam penghargaan Juara 1 Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK R) Pandawa Tingkat Propinsi DIY Tahun 2023, Kabupaten Layak Anak, Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Provinsi DIY, Piagam Penghargaan LPMK Kalurahan Wahyuharjo Lendah, Juara 3 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Kid's Atletik Putra Tahun 2023, Pembinaan Akreditasi Satuan PAUD & PNF, Dinas Kesehatan Kab/kota terbaik dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di DIY dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023.

Berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan di atas, dengan berbagai pencapaian maupun keberhasilan, namun seperti kita ketahui bersama masih banyak tantangan, peluang, harapan dan permasalahan yang kita hadapi.

Oleh karena itu, hal itu semua harus kita hadapi dan kita atasi secara bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, swasta atau dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta memperoleh kemajuan seperti dalam tema peringatan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023.(*)

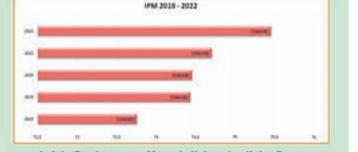


Table with 3 columns: No, Kapanewon, Luas Wilayah (km²), Persentase (%). Lists 12 Kapanewons and their respective areas and percentages.

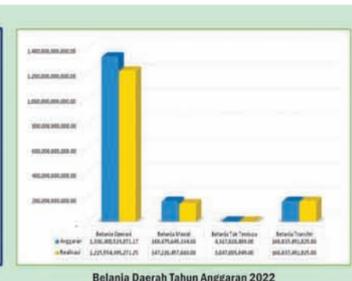
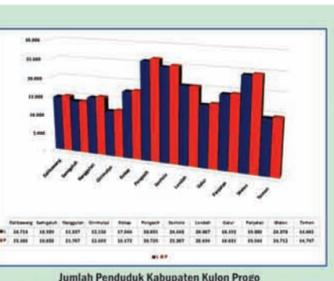


Table with 4 columns: No, Indikator Kinerja Makro, Capaian Kinerja Tahun 2021, Capaian Kinerja Tahun 2022, Perubahan. Lists 6 macro performance indicators and their changes.